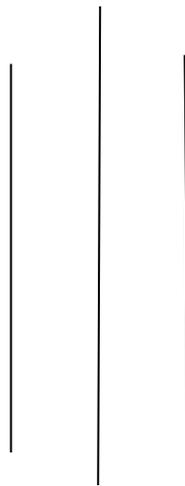




LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA MENINJAU SARANA PRASARANA
INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI
DI KABUPATEN INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL 12 JUNI 2023**



KOMISI V DPR RI

JAKARTA, 2023

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	3
I.1. Dasar Hukum	3
I.2. Maksud dan Tujuan.....	3
I.3. Lokasi dan Waktu.....	4
I.4. Agenda Kunjungan.....	4
II. HASIL KUNJUNGAN DAN PERTEMUAN	4
II.1. Gambaran Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa barat	4
II.2. Profil Pembangunan Modernisasi Daerah Irigasi Rentan.....	6
II.3 Profil Usulan Pembangunan Pengaman Pantai (Breakwater) di Kabupaten Indramayu.....	9
II.4. Hasil Peninjauan, Pertemuan dan Usulan.....	11
II.5. Kesimpulan dan Rekomendasi	12
LAMPIRAN:	13
Dokumentasi Kegiatan.....	133



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA MENINJAU SARANA PRASARANA INFRASTRUKTUR DAN
TRANSPORTASI DI KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL 12 JUNI 2023**

=====

I. PENDAHULUAN

I.1. DASAR HUKUM

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
4. Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR RI tanggal 16 Mei 2023.

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat adalah:

- a. Untuk meninjau secara langsung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.
- b. Untuk mengetahui dan mendengar secara langsung permasalahan serta usulan terkait infrastruktur di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

Tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja adalah dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Dewan sesuai dengan Pasal 59, ayat (4), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, yaitu:

- butir a. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;*
- butir d. *melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.*

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 60 ayat (3) juga menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:"

butir f *mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.*

I.3. LOKASI DAN WAKTU

Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 tanggal 12 juni 2023, yang dipimpin oleh **Bapak ROBERT ROUW** (A-405/F-NASDEM/Dapil PAPUA).

I.4. AGENDA KUNJUNGAN

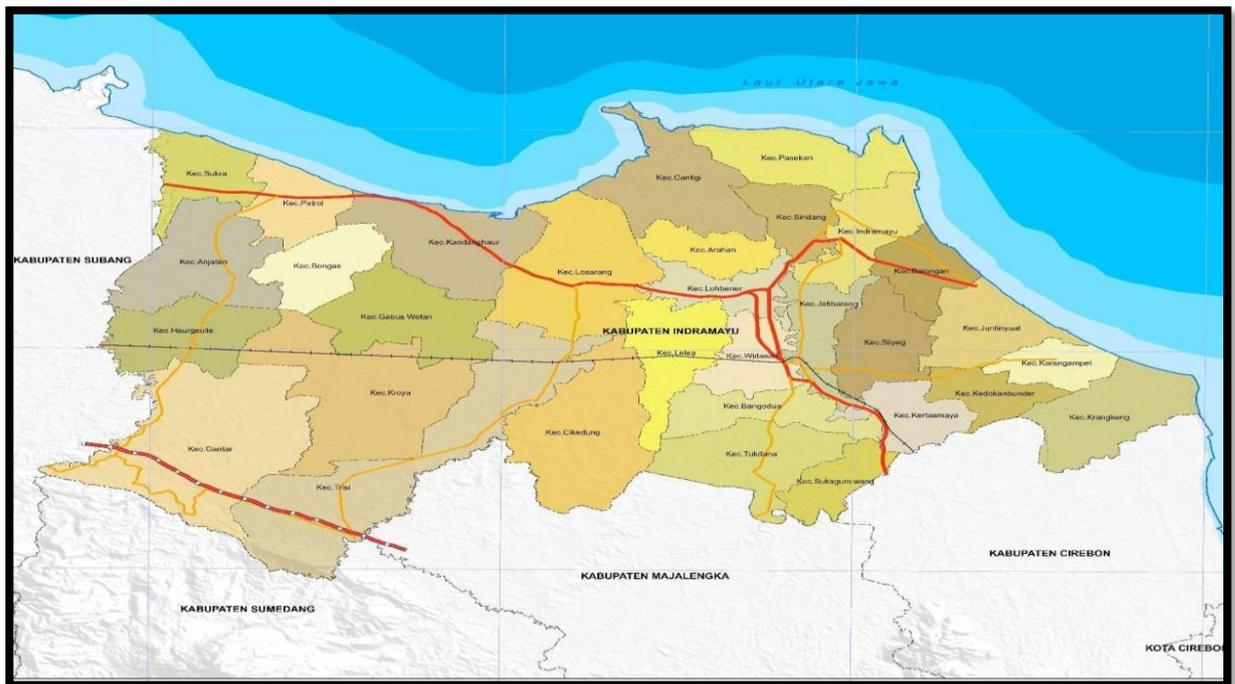
Agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat yaitu peninjauan dan pertemuan Komisi V DPR RI dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Badan Pengelola jalan Tol (BPJT).

II. HASIL KUNJUNGAN DAN PERTEMUAN

II.1. GAMBARAN UMUM DI KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT

Kabupaten Indramayu terletak di pesisir Utara Pulau Jawa di Provinsi Jawa Barat, secara geografis, Kabupaten Indramayu berada pada posisi 107⁰ 51' – 108⁰ 32' BT dan 06⁰ 13' – 06⁰ 40' LS. Luas wilayah Kabupaten Indramayu seluas kurang lebih 208.782,98 Ha, dengan panjang pantai kurang lebih 147 Km yang membentang sepanjang pantai utara Laut Jawa antara Kabupaten Cirebon – Kabupaten Subang dan secara administratif Kabupaten Indramayu mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara	Laut Jawa
Sebelah Selatan	Kabupaten Majalengka, Sumedang, dan Cirebon
Sebelah Barat	Kabupaten Subang
Sebelah timur	Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon



Secara wilayah administrasi, Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 kecamatan, 309 desa dan 8 kelurahan. Adapun beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan laut di sepanjang pesisir pantai utara Indramayu sejumlah 11 wilayah kecamatan dengan jumlah wilayah desa sebanyak 38 desa. Dari seluruh kecamatan tersebut, Kecamatan Trisi merupakan kecamatan dengan luasan terbesar yaitu sebesar 17.721,63 Ha sedangkan Kecamatan Karangampel merupakan kecamatan dengan luasan terkecil yaitu sebesar 3.075,60 Ha.

Topografi wilayah, Kabupaten Indramayu mempunyai topografi yang bervariasi dari permukaan datar hingga sedikit bergelombang, akan tetapi sebagian besar merupakan daerah rendah atau landai dengan kemiringan tanahnya rata-rata 0-2 % dan ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut dengan 89,70 % dari keseluruhan berada pada ketinggian 0-3 mdpl. Hal ini salah satu menjadi penyebab apabila terjadi bencana banjir rob di pesisir Kabupaten Indramayu, luas genangan yang ditimbulkan cukup luas. Jenis penggunaan lahan pun sangat bervariasi namun yang paling dominan yaitu penggunaan lahan berjenis sawah irigasi yaitu sebesar 108.031,81 Ha (49,99 %) sedangkan lahan budidaya tambak perikanan sendiri berada di urutan ke-3 terbesar yaitu sebesar 19.775,26 Ha (9,15 %);

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu, dijelaskan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Indramayu pada tahun 2019 berjumlah sebanyak 1.728.469 jiwa yang terdiri dari 890.102 jiwa penduduk laki-laki dan 838.367 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata di Kabupaten Indramayu sebesar 0,54 % per tahun. Apabila dilihat dari kepadatan penduduk di Kabupaten Indramayu tentu akan berbeda-beda pada setiap kecamatannya namun kepadatan penduduk terpadat pada tahun 2019 yaitu berada di Kecamatan Indramayu dengan kepadatan 2.325 jiwa/km² Indramayu sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Terisi dengan kepadatan 324 jiwa/km²;

Kabupaten Indramayu sendiri menurut dokumen Kajian Risiko Bencana tahun 2019-2023, mempunyai tingkat kerawanan yang tinggi terhadap beberapa jenis bencana seperti banjir, banjir rob, banjir bandang, angin puting beliung, dan abrasi. Selain itu, terdapat beberapa jenis bencana yang mempunyai tingkat kerawanan yang sedang seperti gempa bumi, kebakaran hutan/ lahan, kekeringan, dan tanah longsor;

Banjir rob sering terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu, hal ini terjadi karena gelombang laut pasang serta karena kondisi geografis yang relatif landai. Perubahan iklim yang sudah menjadi isu global diyakini telah menyebabkan perubahan sistem alam termasuk wilayah pesisir. Gelombang pasang yang terjadi semakin tahun semakin luas jangkauannya, dengan periode yang semakin singkat dan intensitas yang semakin meningkat. Bahkan pada tahun 2016, bencana di Kabupaten Indramayu didominasi oleh bencana banjir rob yang menyebabkan ribuan rumah terendam, menyebabkan pertanian gagal panen dan budidaya tambak mengalami kerugian yang cukup besar, sampai di awal tahun 2023 pun banjir rob masih sering terjadi di sejumlah wilayah kabupaten Indarmayu.

II.2. PROFIL PEMBANGUNAN MODERNISASI DAERAH IRIGASI RENTAN

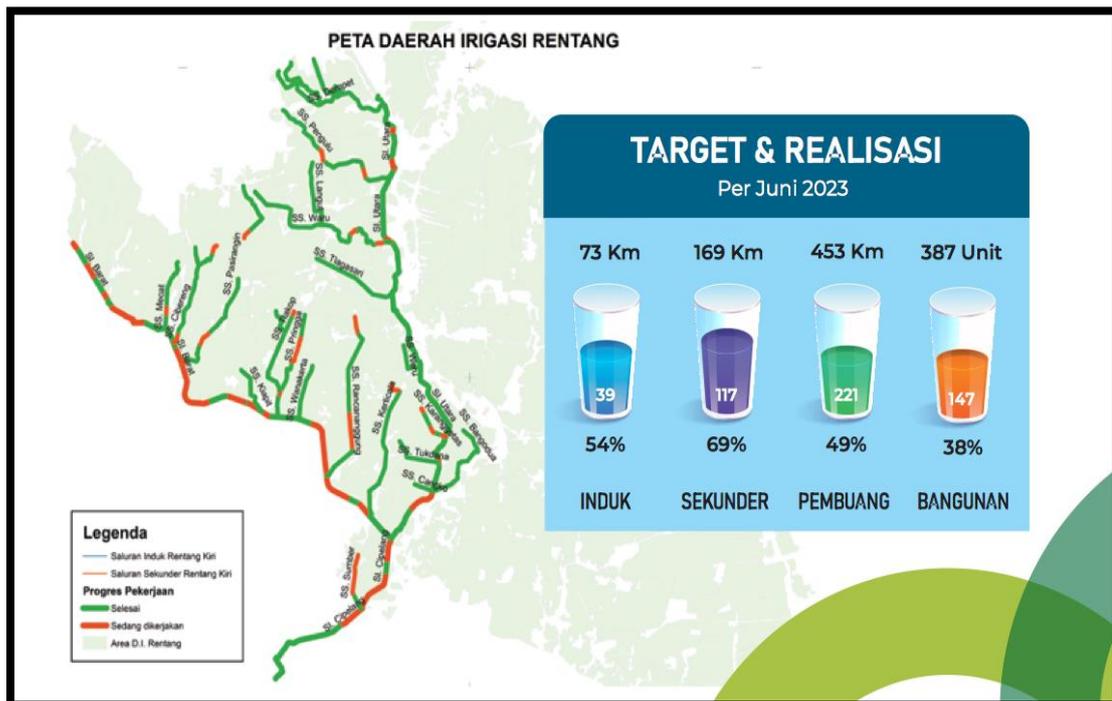
Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu proyek rehabilitasi dan modernisasi Jaringan Irigasi Rentang di Jawa Barat berdasarkan Perpres Nomor 109 Tahun 2020, Proyek ini di mulai tahun 2017 dan ditargetkan selesai pada tahun 2024 agar pembangunan infrastruktur dapat memberikan outcome yang bermanfaat.



Sistem Irigasi Rentang saat ini mengairi areal layanan seluas lebih dari 87.840 Ha yang meliputi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Majalengka (2 kecamatan), Kabupaten Cirebon (11 Kecamatan) dan Kabupaten Indramayu (24 Kecamatan), dengan dua aliran daerah layanan yaitu Rentang Kanan (35.545 Ha) dan Rentang Kiri (51.294 Ha). Pemantauan PSN Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung.

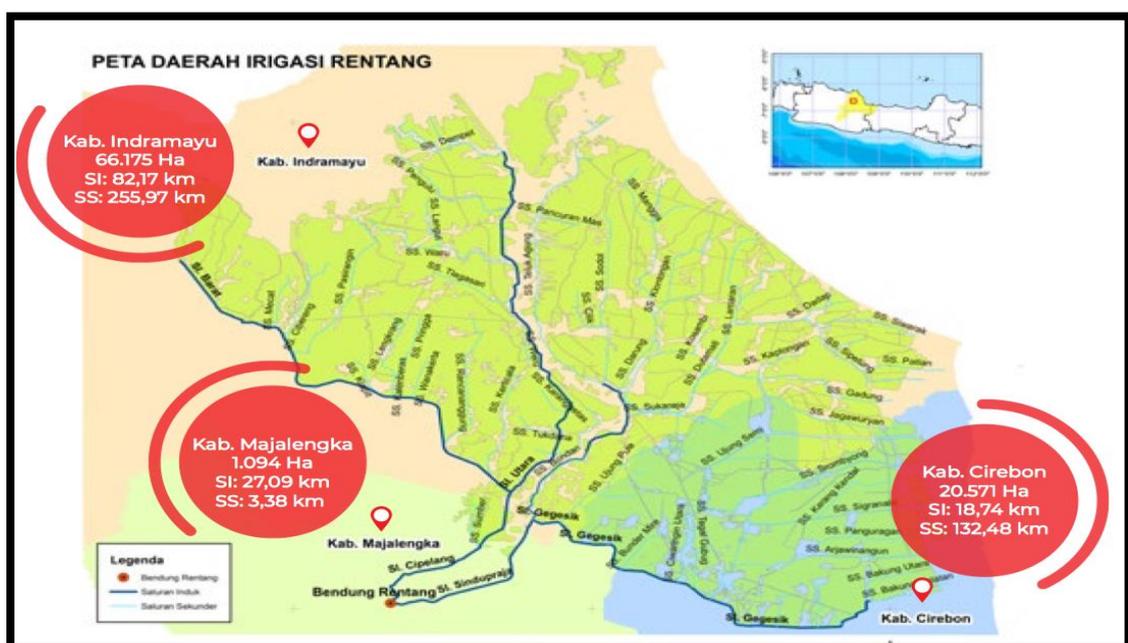
Sebagai informasi, Jaringan Irigasi Rentang dan Bendung Rentang pada awalnya dibangun sejak tahun 1911 dan menjadi salah satu infrastruktur penting sejak zaman Hindia-Belanda hingga saat ini. Lalu, pada tahun 1982 dilaksanakan pembangunan Bendung Rentang baru dan rehabilitasi serta peningkatan Jaringan Irigasi Rentang melalui bantuan World Bank.

Berdasarkan keterangan Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung Ismail Widadi menyampaikan bahwa proyek RIMP (Rentang Irrigation Modernization Project) yang efektif sejak tahun 2017 telah terkontrak sebesar 3,7 triliun rupiah sampai dengan tahun 2021 dari total anggaran pembiayaan loan JICA sebesar 5,5 triliun rupiah. BBWS Cimanuk Cisanggarung juga telah melaksanakan program Padat Karya pada Agustus 2021 dengan total anggaran sebesar 22,1 miliar rupiah dan dapat menyerap 1.042 tenaga kerja dari 36 desa di Kabupaten Majalengka dan Indramayu.



Data teknis daerah irigasi: Luas baku 87.840 Ha, Sumber air dari Waduk Jatigede, lebar bendung 27.000 meter, Pintu Spillway: pintu radial set, Pintu Sluiceway: Pintu sorong ganda 4 set, Kegiatan kontruksi modernisasi daerah irigasi rentang:

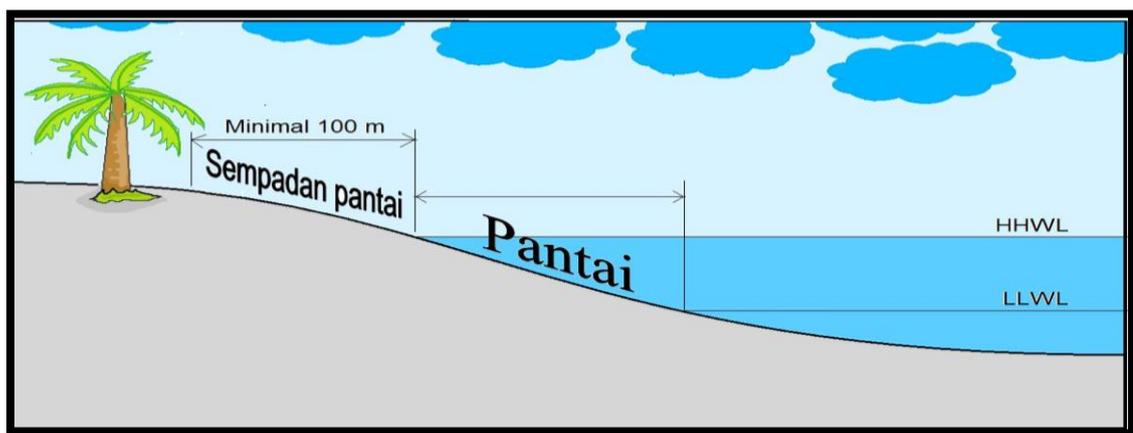
- Bendung dan saluran induk ttarget 73 Km, periode kontruksi tahun 202-2024;
- Saluran sekunder target 169 Km periode kontruksi tahun 2020-2026;
- Saluran tersier target 453 Km periode kontruksi 2023-2026.



II.3 PROFIL USULAN PEMBANGUNAN PENGAMAN PANTAI (BREAKWATER) DI KABUPATEN INDRAMAYU

Terkait bangunan pengaman pantai berdasarkan Permen PUPR No.07/PRT/M/2015 tentang pengamanan pantai yang secara terminologi yaitu:

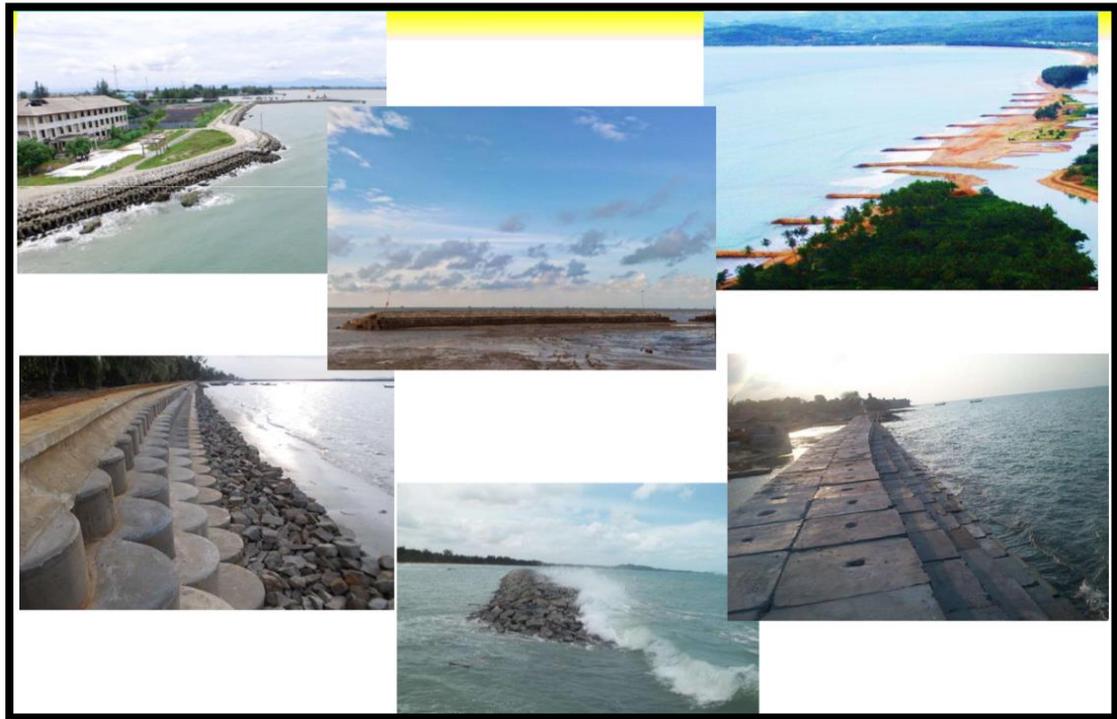
- Pantai adalah daerah yang merupakan pertemuan antara laut dan daratan diukur pada saat pasang tertinggi dan surut terendah;
- Daerah pantai adalah suatu daratan beserta perairannya di mana pada daerah tersebut masih saling dipengaruhi baik oleh aktivitas darat maupun laut;
- Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut;
- Pengamanan pantai adalah upaya untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi.



Amanah Permen PUPR No. 7 tahun 2015 Tentang Pengaman Pantai mengatakan “Pengamanan Pantai” adalah upaya untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi.

Untuk melindungi dan mengamankan:

- a. Masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai dari ancaman gelombang dan genangan pasang tinggi (rob);
- b. Erosi dan abrasi;
- c. Fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan nilai sejarah serta nilai strategis nasional yang berada di sepanjang pantai; dan
- d. Pendangkalan muara sungai.



Jenis Bangunan Pengamanan Pantai (BPP)

- a. Revetmen adalah struktur di pantai yang dibangun menempel pada garis pantai dengan tujuan untuk melindungi pantai yang ter-erosi;
- b. Tembok laut adalah struktur pantai yang dibangun dalam arah sejajar pantai dengan tujuan untuk melindungi pantai terhadap hempasan gelombang dan mengurangi limpasan genangan areal pantai yang berada di belakangnya;
- c. Pemecah ombak adalah konstruksi pengaman pantai yang posisinya sejajar atau kira-kira sejajar garis pantai dengan tujuan untuk meredam gelombang datang;
- d. Groyne adalah bangunan yang dibuat tegak lurus atau kira-kira tegak lurus pantai, berfungsi untuk mengendalikan erosi yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan angkutan pasir sejajar pantai (longshore sand drift);
- e. Jeti adalah bangunan menjorok ke laut yang berfungsi sebagai pengendalian penutupan muara sungai atau saluran oleh sedimen;
- f. Tanggul laut adalah bangunan pejal atau berisi yang digunakan untuk menahan muka air laut atau periran, sehingga terjadi perbedaan tinggi permukaan air;
- g. Pengisian pasir adalah kegiatan untuk membentuk pantai menjadi stabil dengan menambahkan pasir ke pantai.

II.4. HASIL PENINJAUAN, PERTEMUAN DAN USULAN

Beberapa topik dan usulan pada peninjauan serta pertemuan yang menjadi perhatian pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, antara lain:

1. Perlu dukungan semua pihak agar Kabupaten Indramayu sebagai salah satu lumbung beras nasional sehingga percepatan penyelesaian pembangunan irigasi rentang segera diselesaikan sehingga tujuan pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kabupaten Indramayu khususnya petani;
2. Kami memohon agar segera dibangun akses jalan tol Cikopo-Kalimanan menuju Kabupaten Indramayu;
3. Kabupaten Indramayu yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa (panjang pantai 170 km), beberapa pemukiman masyarakat di sepanjang pinggir pantai sering terjadi abrasi sehingga diperlukan pembangunan pemecah ombak di beberapa wilayah;
4. Kami mengusulkan adanya pembangunan relokasi rumah masyarakat sebanyak 172 yang tanah relokasinya sudah dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu;
5. Adanya beberapa perlintasan kereta di wilayah kabupaten Indramayu yang tidak ada palang pintunya, perlunya Ditjen Perkeretaapian memperhatikan perlintasan kereta untuk mengantisipasi seringnya terjadi kecelakaan;
6. Terkait pembangunan *underpass* di Stasiun Jatibarang, perlunya dipikirkan alternatif agar pembangunannya mengantisipasi dapat dilewati oleh kendaraan barang yang mempunyai ukuran ketinggian tertentu;
7. Kami menghimbau agar pembangunan pemecah ombak di Pantai Karangsong memperhatikan juga sinkronisasi dengan stake holder lain karena di Pantai karangsong terdapat juga pelabuhan nelayan yang berbagai macam ukuran kapalnya;
8. Kami mengusulkan agar pembangunan perlintasan sebidang kereta api di beberapa lokasi berbentuk *fly over*;
9. Terkait pembangunan akses tol, perlunya semua pihak berkordinasi dengan BPJT apakah sudah ada perencanaannya (*blue print*), agar segala persiapannya yang sedang dilakukan pemerintah Kabupaten Indramayu dan seluruh pihak dapat terselenggara dengan baik dan matang;

10. Kami menghimbau kepada KemenPUPR untuk terus fokus dan memperhatikan sarana dan prasarana infrastruktur dalam mendukung peningkatan infrastruktur transportasi jalan melalui rencana pembangunan jalan tol Kertajati-Indramayu;

II.5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Komisi V DPR RI mendukung sepenuhnya pembangunan sarana prasarana infrastruktur yaitu percepatan penyelesaian irigasi rentang, usulan pembangunan pemecah ombak (*breakwater*) di Desa Lombang dan pantai Karangsong serta pintu keluar jalan tol, di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk lebih memfokuskan kegiatan pembangunan infrastruktur khususnya terkait sarana prasarana bangunan air untuk memperkuat dan meningkatkan lumbung beras nasional di Kabupaten Indramayu;
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR agar segera berkordinasi dengan pemerintah Kabupaten Indramayu terkait beberapa usulan pembangunan sarana prasarana infrastruktur dari pemerintah Kabupaten Indramayu;
4. Komisi V DPR RI meminta kementerian Perhubungan agar segera menata perlintasan sebidang di wilayah Kabupaten Indramayu.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI dan dapat ditindaklanjuti Pemerintah dalam perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat, khususnya mempercepat rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, yang pada akhirnya akan menggerakkan sektor ekonomi, pangan dan sektor lainnya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

KETUA TIM

ttd

ROBERTH ROUW
A-405

LAMPIRAN:
Dokumentasi Kegiatan















